



BERSEPEDA KE SEKOLAH: Tiga anak berangkat ke sekolah mengendarai sepeda melewati Jalan Gombang-Rajek, Kalurahan Tirtoadi, Kapanewon Mlati, Sleman, Senin (3/2/2025). Masih banyak ditemui di pedesaan, anak-anak bersekolah dengan sepeda melewati lingkungan persawahan yang asri meski sedikit demi sedikit berkurang karena dibangun permukiman.

RTM

tak perlu menghadapi risiko kesulitan mengakses gas LPG 3 kg berlarut-larut. Ia pun menjelaskan, rencana pemerintah dan PT Pertamina mengalihkan ujung tombak penjualan gas LPG 3 kg ke pangkalan bertujuan untuk mengontrol penjualan. Kebijakan itu ditargetkan dapat membuat kebijakan subsidi tepat sasaran. Namun, ia mengingatkan pemerintah untuk mengimbangi kebijakan dengan komunikasi publik yang baik agar tak menimbulkan kepanikan banyak pihak. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkominda), terutama kepala daerah dan aparat kepolisian, juga diminta untuk segera melakukan operasi pasar di wilayah masing-masing. Kepada masyarakat, Ketua Banggar menjamin alokasi subsidi LPG 3 kg pada tahun anggaran 2025 sangat mencukupi. Pada APBN 2025, Badan Anggaran DPR

bersama pemerintah telah menyepakati alokasi subsidi LPG 3 kg sebesar Rp 87,6 triliun, lebih tinggi dari tahun pagu tahun 2024 sebesar Rp 85,6 triliun. Banggar DPR menyepakati usulan pemerintah untuk menyubsidi gas melon sebesar Rp 30 ribu per tabung, sehingga harga dasar LPG 3 kg menjadi Rp 12.750 dari seharusnya Rp 42.750. Sementara itu, Polri mengatakan siap membantu Pertamina dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan di tengah masyarakat akibat kesulitan membeli elpiji 3 kilogram. "Apabila ini diperlukan langkah-langkah secara kolaborasi, tentu Pertamina dalam hal ini juga akan berkolaborasi dengan Polri," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta, Senin.

lalu juga mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban serta keamanan selama situasi ini berlangsung. "Kami imbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban, kemudian juga keamanan lingkungan dan harapannya adalah kembali pulih," ujarnya. Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta Hari Nugroho menyampaikan, memang terjadi kelangkaan elpiji 3 kilogram di berbagai lokasi karena pemerintah mengurangi kuota elpiji bersubsidi pada 2025 ini. Sejak awal, kuota elpiji subsidi untuk Jakarta di 2025 sebesar 407.555 metrik ton (MT), sementara realisasi penyaluran elpiji pada 2024 sebesar 414.134 MT. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahilil Lahadalia memastikan tidak ada kelangkaan dalam distribusi LPG 3 kilogram. (Ant/Ful)-d

Sambungan hal 1

Ribuan

Dalam orasi yang disampaikan, massa memprotes keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) yang mengangkat honorer R2 dan R3 menjadi PPPK Paruh Waktu dan menuntut agar status mereka diubah menjadi PPPK Penuh Waktu. Keputusan MenPAN RB Nomor 16 Tahun 2025 tersebut dianggap tidak memadai oleh para tenaga honorer. Setidaknya ada empat tuntutan massa dalam aksi tersebut. Pertama, segera diakhirkannya RPP Manajemen ASN Turunan dari RUU ASN No. 20 Tahun 2023 yang mengakomodasi tenaga honorer non-database BKN R2 dan R3 sebagai PPPK penuh waktu. Kedua, terbitnya Keppres untuk mengangkat Non-ASN Database BKN menjadi PPPK penuh waktu. Ketiga, meno-

lak rekrutmen CPNS Tahun 2023 sebelum proses pengangkatan honorer R2 dan R3 tuntas. Keempat, pemerintah diharapkan mengoptimalkan anggaran dan formasi untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN PPPK penuh waktu di daerah. Perwakilan massa mengingatkan tentang perjuangan mereka yang sudah berlangsung lama. "Kami bersedia untuk mengumpulkan perjuangan untuk bersama-sama menuntaskan (permasalahan) R2, R3, se-Indonesia. Kami yang berjuang hari ini telah bekerja untuk negaranya walaupun tidak dihargai. Bangkitkan semangat kalian!" serunya dengan penuh semangat. Sebagai tindak lanjut atas aksi tersebut, sebanyak 10 orang perwakilan dari tiap provinsi dan Ketua DPP Aliansi Honorer Indonesia melakukan audiensi dengan

Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI. Ketua BAM DPR RI Netty Prasetyani menyampaikan aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan massa telah dicatat dengan baik. "Setelah kami laporkan ke pimpinan DPR RI, mudah-mudahan segera komisi yang terkait, khususnya komisi 2, akan menyelenggarakan rapat dengan kementerian dan lembaga yang terkait dengan persoalan yang Ibu Bapak hadapi selama ini," ujarnya. Menanggapi hal tersebut, massa mengancam akan melakukan mogok kerja jika dalam waktu satu bulan tidak ada langkah konkret dari pemerintah untuk memenuhi tuntutan mereka. "Kami datang kemari bukan hanya menuntut sebagai honorer paruh waktu, tetapi kami menuntut kesejahteraan kami," ujar salah satu orator. (Ant/Has)-d

Sambungan hal 1

Paradigma

Kalau mendasarkan pada Pasal 33 ayat (3) UUD1945 yang menyatakan iBumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka apapun yang akan dilakukan negara sepanjang untuk kemakmuran rakyat, termasuk laut baik untuk nelayan maupun untuk korporasi maka sah-sah saja. Alasannya, menurut pandangan modern tujuan korporasi itu adalah termasuk untuk kesejahteraan rakyat, yang bertolak belakang dengan pandangan konvensional yang berorientasi pada keuntungan dan laba dengan mengabaikan kesejahteraan rakyat. Harapan pemerintahan Jokowi ketika tanah perairan pesisir dibuat pagar laut untuk korporasi. Tujuannya adalah termasuk kesejahteraan rakyat, sehingga bisa dikavling-kavling. Namun faktanya adalah justru sebaliknya yang bisa disebut sebagai disorientasi konstitusi karena tujuan korporasi tidak sepeham dengan welfare state. Berkaitan dengan kavling tanah laut, ada paradigma baru dalam hukum pertanahan Indonesia. Pertama, menurut Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum UGM, Prof Nurhasan Ismail, yang dimuat di berbagai media elektronik, tanah perairan bisa dilekatkan alas hukum hak atas tanah. Hal

ini mengacu pada pengertian tanah dalam Pasal 1 ayat (4) UU No 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) adalah bukan hanya tanah yang ada di daratan, tetapi juga tanah yang ada di bawah kolom air, yaitu baik perairan pesisir maupun yang ada di danau atau sungai termasuk dalam definisi tanah. Hal ini senada dengan pengertian tanah menurut Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2021, yang menyatakan bahwa tanah adalah permukaan bumi baik berupa daratan maupun yang tertutup air, sehingga tanah yang ada di laut/perairan pesisir Tangerang dapat diberikan alas hak, sepanjang penerbitan Sertipikat sesuai peraturan perundang-undangan. Kedua, pendekatan hukum bisnis. Mengapa penerbitan HGB tidak diperuntukkan bagi nelayan. Bahwasanya sesuatu yang dapat menjadi objek bisnis maka menjadi incaran Korporasi yang secara teoretis pandangan mengenai tujuan bisnis mengantar faham modern. Oleh karena itu, segala upaya dilakukan Korporasi sekadar untuk mewujudkan tujuan yang sesungguhnya, termasuk mengajukan permohonan pensertipikan tanah di laut pesisir. Walaupun kemudian ditengarai cacat prosedur, sehingga dibatalkan pemerintah berkuasa.

Ketiga, penerobosan hukum Pertanahan, sejak berlakunya UU 5/1960, pemerintah yang menerbitkan HGB dan Hak Milik tanah perairan pesisir adalah pemerintahan Jokowi. Hal tersebut, mendasarkan pada UU No 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021, dimana Negara dapat memberikan Hak Pengelolaan (HPL) kepada Intansi pemerintah pusat, pemerintah Daerah, Badan bank tanah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan hukum milik negara/daerah, atau badan hukum yang ditunjuk pemerintah pusat. Selanjutnya kepada pemegang HPL tersebut diberikan kewenangan yang salah satunya adalah untuk memanfaatkan sendiri atau dikerjasamakan dengan pihak lain, yang selanjutnya di atas HPL dapat diterbitkan HGB, Hak Pakai, Hak Guna Usaha. Secara yuridis proses penerbitan hak atas tanah, dimulai dari kegiatan pendaftaran tanah. Untuk dapat dilakukan pendaftaran tanah, maka tanah di perairan pesisir harus terlebih dahulu berwujud bidang tanah. Pemerintahan Prabowo-Gibran diharapkan dapat menegakkan hukum dan keadilan, termasuk hukum pertanahan guna mewujudkan negara welfare state. (Penulis adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Anabadra Yogyakarta)-d

Sambungan hal 1

DUKUNG IMPLEMENTASI ESG BSI Luncurkan Mobil Operasional Listrik

JAKARTA (KR) - Bertepatan HUT ke-4, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) meluncurkan platform Digital Carbon Tracking serta penggunaan 139 kendaraan operasional listrik (EV) untuk mendukung komitmen terhadap green operation. Aktivitas ini merupakan implementasi komitmen perseroan untuk menjalankan transformasi operasional yang berkelanjutan dan sesuai prinsip Environmental, Social, dan Governance (ESG) serta sejalan dengan persiapan perusahaan mendukung Asta Cita Pemerintah untuk ekonomi hijau. Untuk memperkuat dukungan terhadap kegiatan sosial, pada Tasyakuran Milad ke-4 BSI juga meluncurkan empat mobil musala untuk mendukung event-event daerah dan nasional. Serta memfasilitasi masyarakat luas untuk kebutuhan tempat ibadah. Direktur Utama BSI Hery Gunardi di Jakarta, Senin (3/2) mengatakan, di usia yang ke-



Dirut BSI Hery Gunardi bersama Komisaris Utama BSI Muliawan D Hadad melepas mobil listrik dan mobil musala.

empat, BSI terus berupaya mengintegrasikan aspek sosial dan keberlanjutan lingkungan dalam setiap aspek yang dilakukan. Hal ini juga sejalan dengan Asta Cita Pemerintah untuk mendorong kemandirian bangsa melalui ekonomi hijau dan pencapaian target Net Zero Emission (NZE) Indonesia pada 2060. Hery menyebutkan, peluncuran platform Digital Carbon

Tracking serta penggunaan EV menjadi salah satu bukti nyata inovasi BSI dalam penerapan prinsip ESG yang sejalan dengan tema milad BSI ke-4 yaitu Agile and Innovative. Digital Carbon Tracking merupakan platform untuk mengukur, mengelola, dan melaporkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan dari kegiatan operasional BSI di kantor pusat dan 1.130 outlet di seluruh Indonesia. (Ogi)-d

Anggaran

"Karena jangan sampai buat dapur, kemudian sekolahnya, ruang utamanya tidak bagus, bocor, dan lain-lain. Kemudian, kelengkapan sekolahnya, kursinya miring-miring," ucapnya. Bahkan, tambah Mendagri, Presiden Prabowo memberikan atensi besar terhadap perbaikan sarana toilet di sekolah-sekolah di Tanah Air. "Terutama beliau sangat menekankan sekali masalah toilet Pak, dan itu menjadi atensi kami. Jadi toilet untuk anak sekolah, semua sekolah, SD, SMP, SMA, semua harus baik," tuturnya. Tito juga mengaku sudah berdiskusi dengan Kepala BGN Dadan Hindayana terkait pengalokasian anggaran oleh Pemerintah Daerah guna menopang Program MBG. Menurutnya, Kepala BGN meminta dua hal utama dari Pemerintah Daerah, dan hal itu tidak berkaitan dengan anggaran. "Daerah bisa menjadi mitra untuk menyiapkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada dapur untuk menyiapkan makanan dan lain-lain itu nanti akan disewa oleh Badan Gizi, dan setelah itu bisa mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk daerah-daerah," katanya. Selain itu, ujarnya lagi, daerah diminta pula

untuk mengintensifkan suplai guna memenuhi pasokan pangan pada SPPG yang ada di daerah-daerah tersebut. "Yaitu beternak, kemudian nanam untuk suplai kepada satuan pelayanan tadi SPPG tadi karena akan memerlukan jumlah suplai yang banyak sekali, pangan, baik itu ternak dari peternakan maupun dari pertanian, perkebunan, termasuk juga bagi UMKM dan desa-desa misalnya," paparnya. Mendagri meyakini pelaksanaan MBG dengan melibatkan daerah seperti skema di atas pada akhirnya akan mampu menciptakan ekonomi sirkular. "Program ini menurut pendapat kami bisa memancing itu, memancing produksi terjadi ekonomi sirkular. Nah, itulah yang kami dorong kepada rekan-rekan di daerah, selain tadi kalau mau menjadi mitra SPPG dengan membangun satuan pelayanan yang akan disewa oleh Badan Gizi Nasional," ucapnya. Mendagri pun menegaskan agar tak ada anggaran daerah yang digunakan untuk Program MBG. "Anggaran pendidikan yang ada jangan digunakan untuk Makan Bergizi Gratis, tapi digunakan untuk memperbaiki sekolahnya, yaitu terutama toilet," ujar Tito. (Ant/San)-d

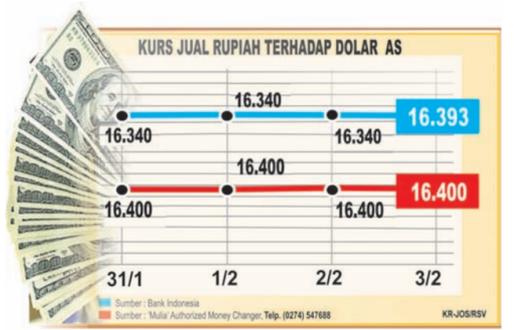
Sambungan hal 1

Dosen

Besaran pencairan Tukin untuk masing-masing Dosen ASN di Indonesia diberikan sesuai kelas dan jabatan. Untuk Asisten Ahli Rp 5 juta, Rektor Rp 8 juta dan Guru Besar 13 juta. Titis mengatakan, Tukin yang diharapkan cair dinilai sangat bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. "Pokoknya kami para dosen ini banyak yang mencari kerja sambilan, ada yang nyambi event organizer, ada yang buka catering dan kerja sambilan lainnya," katanya. Prof Dr Dra Yudiaryani MA saat membacakan tuntutan didampingi guru besar lainnya selaku penanggungjawab aksi Prof Drs Triyono Bramantyo MMuEd PhD, Prof Dr Kasidi MHum dan Prof Dr Drs Nur Sahid MHum menyatakan, "Jangan sampai Tukin tidak dibayarkan hanya karena ketidakpahaman pejabat Kerneristekdikti era Nadiem Makarim mengenai proses birokrasi dan harmonisasi pencairan tukin dosen 2020-2024," tegasnya. Ketidappahaman tersebut, lanjutnya, jangan dijadikan alasan untuk tidak dicairkannya Tukin dosen 2020-2024. "Dosen merupakan pelaksana dari amanat UU, sedangkan permasalahan birokrasi adalah urusan pejabat benwenang di kementerian," tandasnya

Aksi diwamai flash mob tarien oleh para dosen peserta aksi yang sebagian berendang penari dan diiringi tetabuhan drum maupun perkusi. "Tukin untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme ASN di lingkungan kampus dan berdampak pada peningkatan kinerja PTN secara komprehensif. Tahun 2025 harmonisasi antar

Kementerian dan DPR telah terjadi kesepakatan, maka harus segera dicairkan secepatnya," papar peserta aksi lainnya. Bahkan peserta aksi kompak menyerukan yell-yel. "ISI bersatu tak bisa dikalahkan, Tukin turun menjadi keharusan" dengan berbagai orasi penuh semangat. (Jdm/Vin)-d



Prakiraan Cuaca Selasa, 4 Februari 2025

Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu C	Kelembaban
Bantul					22-30	65-95
Sleman					22-29	65-95
Wates					22-29	65-95
Wonosari					22-30	65-95
Yogyakarta					22-30	65-95



Fungsi Kawasan Jeron Beteng, Kraton, Yogyakarta: Dulu dan Sekarang

Kraton Yogyakarta merupakan kompleks istana Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Kraton Yogyakarta ini termasuk dalam Kawasan Cagar Budaya (KCB) Kraton yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Nomor 118 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta. Kawasan Kraton Yogyakarta ini dibatasi oleh benteng Kraton, sehingga kawasan ini juga dikenal sebagai Kawasan Jeron Beteng. Berdasarkan beberapa jurnal ilmiah, Kawasan Kraton telah mengalami perubahan. Di Kawasan Jeron Beteng telah mengalami perubahan arsitektur bangunan, yaitu sudah muncul rumah-rumah baru dengan arsitektur

berbeda atau rumah lama yang direnovasi dengan gaya berbeda. Selain itu, di Kawasan Kraton juga sudah mengalami perkembangan pola penggunaan lahan, yaitu sudah tumbuh sektor perdagangan dan jasa. Sebagai area yang terletak di pusat Kota Yogyakarta, Kawasan Jeron Beteng ini mengalami perkembangan kawasan yang dipengaruhi oleh aktivitas masyarakat yang berada di dalamnya. Perkembangan suatu kawasan atau kota dapat mempengaruhi bentuk kota atau kawasan tersebut. Dalam perencanaan wilayah dan kota, istilah bentuk kota dikenal juga dengan urban form atau urban morphology atau morfologi perkotaan. Salah satu komponen dalam

morfologi perkotaan yaitu penggunaan lahan. Untuk mengetahui kondisi penggunaan lahan Kawasan Jeron Beteng pada jaman dulu, dapat dilihat dari peta lama Kawasan Jeron Beteng Tahun 1925 yang bersumber dari Koleksi Digital Leiden University Libraries. Sedangkan pada kondisi sekarang dapat dilihat peta yang bersumber dari interpretasi citra Google earth dan survei lapangan tahun 2024. Berdasarkan hasil penelitian kami, diperoleh bahwa terjadi perkembangan penggunaan lahan pada Kawasan Jeron Beteng, yaitu pada tahun 1925 hanya terdapat 2 jenis fungsi bangunan, sedangkan pada tahun 2024 menjadi 10 jenis fungsi

bangunan. Pada tahun 1925 Fungsi bangunan di Kawasan Jeron Beteng dikelompokkan menjadi 2 fungsi, antara lain yaitu pendidikan dan permukiman. Pada tahun 1925, fungsi bangunan permukiman mendominasi kawasan ini, yaitu sebesar 98,97% dari seluruh bangunan yang ada pada saat itu. Sedangkan fungsi pendidikan hanya memiliki sebesar 1,03%. Fungsi permukiman berwujud permukiman Kraton Yogyakarta. Fungsi pendidikan merupakan sekolah, seperti Gouv Inl School dan Part HIS. Fungsi bangunan di Kawasan Jeron Beteng pada tahun 2024 dikelompokkan menjadi 10 fungsi, antara lain yaitu

kesehatan, olahraga, pariwisata dan hiburan, pendidikan, perdagangan dan jasa, peribadatan, perkantoran, permukiman, pertahanan dan keamanan, dan sosial. Pada periode tahun 2024, fungsi permukiman juga masih mendominasi, dengan luas 52,96 ha atau 81,01% dari total luas seluruh bangunan. Fungsi bangunan terbesar kedua yaitu fungsi perdagangan dan jasa dengan luas 4,53 ha atau 6,93% dari total luas seluruh bangunan. Jika dicocokkan dengan Peraturan Zonasi (Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan) Zona Cagar Budaya, SWP G, Berdasarkan Peraturan Zonasi dalam Peraturan Walikota Yogyakarta No. 118